BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

- 1. Peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan Kabupaten 50 Kota yaitu, Unit tersebut mempunyai program kerja menjadikan 1 nagari per 1 kecamatan sebagai nagari percontohan antikorupsi meskipun program ini belum dilaksanakan tetapi program tersebut merupakan bentuk dari peran unit tersebut dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kemudian peran yang sudah dilakukan oleh unit tersebut adalah melakukan pedidikan antikorupsi melalui sosialisasi dan edukasi, membentuk struktur kepengurusan yang berbentuk sebagai tim agar memudahkan menjalankan tugas dan fungsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitoring/ pemantauan secara langsung turun kelapangan, dan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara terjadwal dengan tujuan mencari solusi jika terjadi permasalahan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya peran dari unit tersebut bukan termasuk Norma Delegasi yang melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dari suatu badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.
- 2. Kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten 50 Kota dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi di sektor pemerintahan daerah yaitu, kinerja unit tersebut diukur menggunakan indikator

jumlah kasus dari tahun 2020-2023 adanya 10 orang pejabat menerima hadiah tetapi yang melaporkan hanya 8 orang saja, maka setelah adanya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dalam menjalankan perannya mulai meningkatnya kesadaran dari pejabat/ASN dalam pelaporan gratifikasi dengan adanya laporan secara berkala yang masuk setiap 3/6 bulan sekali dari instansi atau dinas yang ada di Kabupaten 50 yang berjumlah 16 instansi atau dinas artinya dari tahun 2023-2024 adanya 32 jumlah laporan masuk meskipun laporan yang disampaikan bukan laporan gratifikasi melainkan laporan anggaran dana yang dipakai setiap instansi atau dinas serta anggaran dana jika adanya acara yang dibuat pada instansi atau dinas masing-masing, kemudian kinerja unit tersebut dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan karena berdampak pada kesadaran pejabat/ASN, selanjutnya memanfaatkan perkembangan digital dengan mengikuti seminar-seminar online yang diadakan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan untuk menacari solusi dan ide baru untuk meningkatkan pemberantasan korupsi. Kemudian kinerja unit tersebut masih kurang efektif karena Peraturan Undang-Undang Tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterapkan menjadi peraturan Bupati tentang pembentukan dan pelaksaan tugas unit tersebut.

3. Kendala dan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten 50 Kota dalam upaya pencegahan tindak pidana gratifikasi yaitu, potensi terjadinya gratifikasi yang diterima oleh pejabat/ASN di luar kantor dan jam kerja, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan unit tersebut tidak difasilitasi dan diberi panggung sendiri, rendahnya kesadaran masing-masing pejabat/ASN terkait tindak pidana

gratifikasi, pejabat/ASN masih banyak belum mengetahui keberadaan serta fungsi dan tugas unit tersebut, pengurus unit tersebut mempunyai jabatan ganda. Kemudian upaya yang dilakukan unit tersebut yaitu, memperkuat regulasi mengenai gratifikasi di luar jam kerja dan di luar kantor namun upaya yang telah dilakukan unit tersebut yaitu melakukan pengadaan banner, poster, dan spanduk dengan tujuan memberikan informasi, melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat/ASN, membuat akun media sosial unit tersebut, memberikan pengakuan secara formal dan penghargaan sedangkan yang dilakukan unit tersebut memetakan potensi-potensi terjadinya tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi. Namun upaya yang dilakukan unit tersebut masih ada yang belum terealisasikan dan faktanya upaya yang dilakukan unit tersebut belum sesuai dengan kendala yang terjadi saat ini.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kabupaten 50 Kota harus memberikan dukungan penuh atas program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang akan berencana melakukan dan menciptakan 1 nagari antikorupsi per 1 kecamatan di Kecamatan 50 Kota dengan nagari Situjuah Batua sebagai pedoman. Serta pemerintah juga harus memaksimalkan peranan unit tersebut pada saat ini agar dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian pemerintahan Kabupaten 50 Kota juga harus mengalokasikan anggaran serta mendukung kegiatan unit tersebut dalam

- melakukan sosialisasi dan edukasi agar kegiatan tersebut lebih difokuskan tanpa harus digabungkan dengan acara lain, artinya unit tersebut harus diberi fasilitas dan dukungan berupa alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa harus bergabung dengan acara-acara lain.
- 2. Peningkatan kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dapat dimaksimalkan dengan sosialisasi dan edukasi secara terjadwal, kemudian lebih memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk penyebaran informasi, memperkuat sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses, rutin melakukan evaluasi kinerja, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, seminar-seminar serta menjalin kolaborasi dengan lembaga seperti KPK untuk memperkuat strategi pencegahan tindak pidana gratifikasi.
- 3. Upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten 50 Kota harus adanya inventaris masalah atau kendala yang terjadi dengan sebaik mungkin. Ini bertujuan untuk menemukan jalan keluar dalam mengtasi kendala yang terjadi, kemudian upaya yang dilakukan harus sesuai dengan kendala yang terjadi saat ini, meskipun upaya yang telah dilakukan unit tersebut ada beberapa yang berbeda dengan kendala yag terjadi. Maka upaya tersebut harus lebih dimaksimalkan karena ada upaya yang masih dalam perencanaan atau belum terealisasikan.